

## Hasil Survei Distribusi Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 Kepada Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta

### A. Pengantar

Pemberian jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Hal tersebut dikarenakan pandemi telah berdampak signifikan terhadap berkurang atau bahkan hilangnya mata pencaharian dan penghasilan warga. Program ini menjadi program yang sangat dinanti warga, namun banyak masalah yang diketahui muncul dalam perencanaan serta distribusinya.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok warga rentan yang secara ekonomi sangat terdampak Covid-19. Dari berbagai diskusi yang *Indonesia Corruption Watch* (ICW) adakan bersama dengan organisasi penyandang disabilitas, khususnya di Kota DKI Jakarta, Kupang, Bandung, Solo, dan Makassar, penanganan dampak Covid-19 untuk penyandang disabilitas, termasuk terkait program pemberian bantuan sosial, belum optimal. Mulai dari kurang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, tidak disertai dengan informasi yang lengkap dan ramah penyandang disabilitas, hingga masalah *inclusion error* atau adanya penyandang disabilitas yang membutuhkan bansos namun luput dari distribusi bansos.

ICW kemudian mengadakan survei untuk mendapat gambaran pendapat penyandang disabilitas terhadap distribusi bansos di tengah pandemi Covid-19. Survei ini kami adakan dengan berkolaborasi bersama organisasi penyandang disabilitas dan jaringan ICW di Kota Kupang, Bandung, dan DKI Jakarta. Alasan DKI Jakarta kami pilih, mengingat pada pemantauan ICW di bulan Juni-Agustus 2020 menunjukkan tingginya aduan warga DKI Jakarta terkait masalah bansos. Terdapat sedikitnya 41 aduan dan temuan pemantau yang diantaranya berkenaan dengan dugaan pengurangan atau pemotongan bansos, pungli, bantuan ganda, dan bansos tidak diterima warga. Angka ini merupakan angka tertinggi dibanding dari 12 daerah pemantauan lainnya.

Survei ini juga ICW maksudkan untuk memberikan catatan evaluasi dalam rangka mendorong pembenahan distribusi bansos, khususnya untuk penyandang disabilitas. Kami menilai bahwa program bansos yang sangat krusial di tengah pandemi Covid-19 ini akan maksimal membantu warga apabila didasarkan pada pendataan yang akurat dan juga disesuaikan dengan kebutuhan warga atau target penerima.

### B. Waktu dan Metode Survei

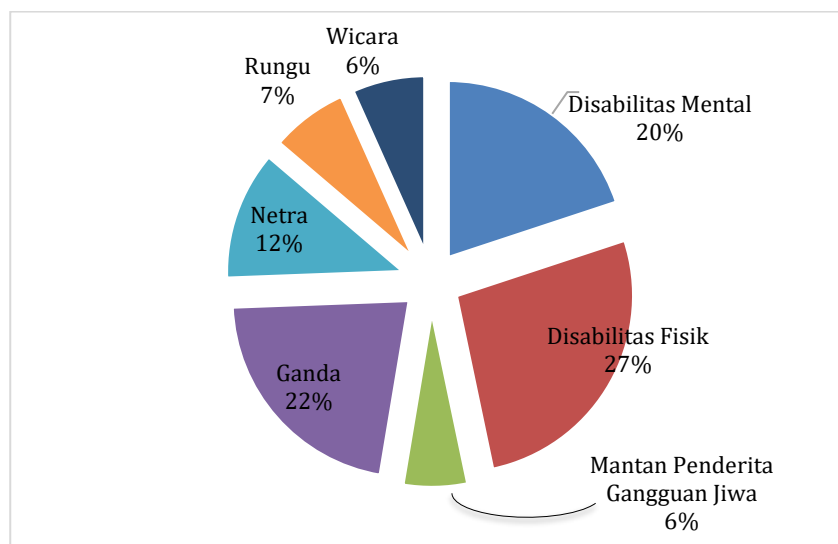
Survei di Kota DKI Jakarta ini kami selenggarakan pada 14-20 Oktober 2020. Berbeda dengan survei di Kota Kupang dan Bandung yang respondennya dipilih secara acak dari seluruh penyandang disabilitas di daerah tersebut, responden survei di DKI Jakarta kami pilih secara acak dari daftar penyandang disabilitas

yang datanya dimiliki oleh Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DKI Jakarta, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) DKI Jakarta, Perkumpulan Jiwa Sehat (PJS), dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan survei kami lakukan secara jarak jauh (melalui telepon dan *video call*) karena DKI Jakarta saat ini tengah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan untuk menghindari resiko penularan Covid-19.

Dari 1.092 penyandang disabilitas yang terdata di DPO dan memiliki kontak, kami memilih secara acak 120 responden berusia minimal 17 tahun dengan mempertimbangkan proporsi pembagian wilayah DKI Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, dan Utara.

Keterbatasan data dalam survei ini adalah populasi survei yang digunakan tidak merepresentasikan secara proporsional jenis disabilitas. Hal ini karena data yang kami gunakan merupakan data dari OPD yang aktif memperharui data, termasuk informasi kontak dan alamat tempat tinggal per April 2020. Jika dibandingkan dengan data Dinas Sosial DKI Jakarta (Diagram I) dengan jumlah total 14.937 penyandang disabilitas terbagi menjadi beberapa jenis disabilitas, yakni disabilitas mental, daksa, ganda, mantan penderita gangguan jiwa, serta sensorik<sup>1</sup> yang dibedakan menjadi netra, rungu, dan wicara. Kami tidak menggunakan data Dinas Sosial DKI Jakarta yang diperbaharui Januari 2020 karena tidak memiliki informasi kontak.

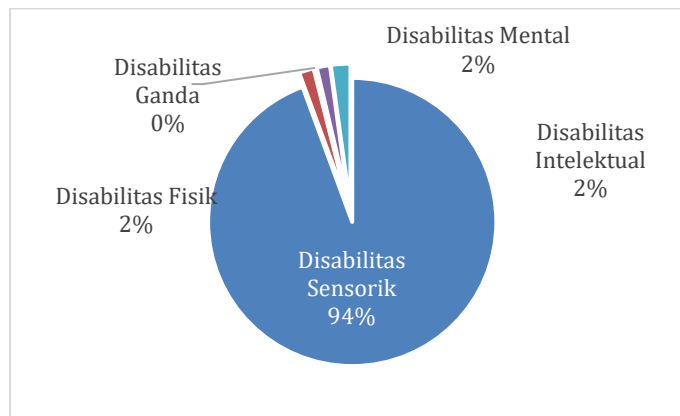
**Diagram I.**  
**Data Penyandang Disabilitas DKI Jakarta**



Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta

<sup>1</sup> Penyandang disabilitas sensorik berkaitan dengan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

**Diagram II.  
Populasi Survei**



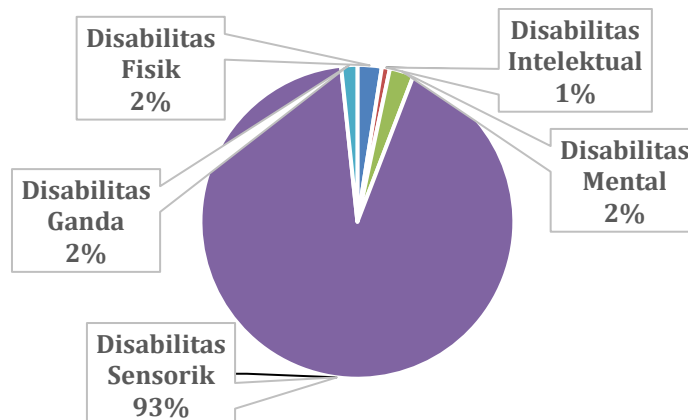
Sumber: Organisasi Penyandang Disabilitas

### C. Profil Responden

#### 1. Jenis Disabilitas

Mayoritas responden survei yaitu penyandang disabilitas sensorik mencapai 111 responden (93%). Selain itu, terdapat pula penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan ganda yang juga menjadi responden dalam survei ini. Responden didominasi penyandang disabilitas sensorik karena di DKI Jakarta, penyandang disabilitas terbanyak yaitu penyandang disabilitas sensorik.

**Diagram III.  
Profil Responden Berdasarkan Jenis Disabilitas**

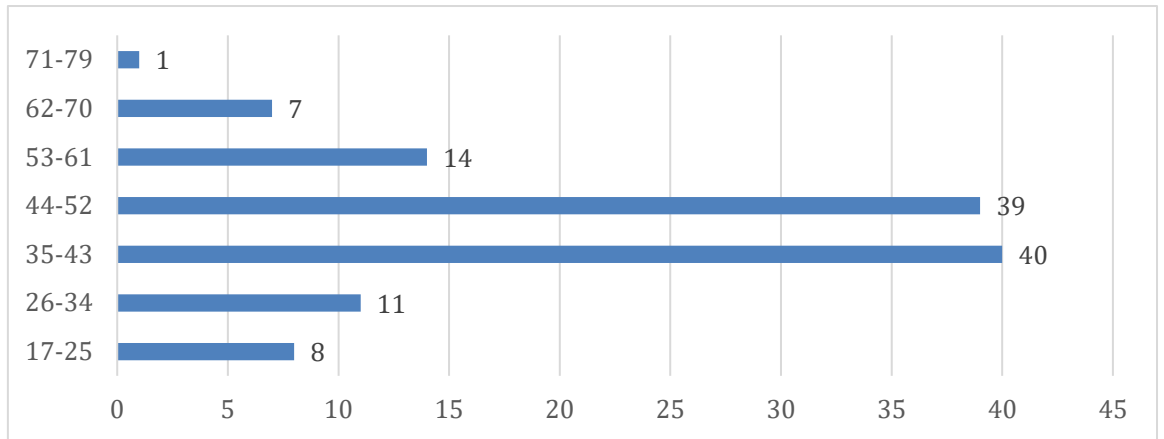


#### 2. Usia

Mayoritas responden berusia di atas 35 tahun. Ada 40 responden berusia 35-43 tahun, 39 responden berusia 44-52 tahun, 14 responden berusia 53-61 tahun, 7 responden berusia 62-70 tahun, serta 1 responden berusia 71-79 tahun. Responden lainnya yakni usia 17-25 tahun ada 8 responden dan 26-34

tahun ada 11 responden,

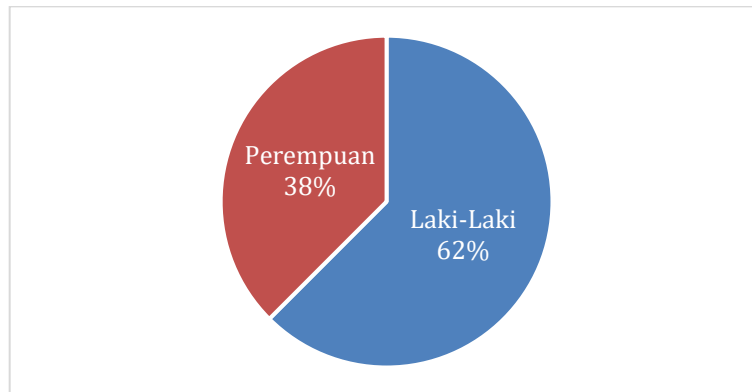
**Diagram IV.**  
**Profil Responden Berdasarkan Usia**



### 3. Jenis Kelamin

Dari 120 responden, 75 responden (62%) berjenis kelamin laki-laki dan 45 responden (38%) berjenis kelamin perempuan.

**Diagram V.**  
**Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

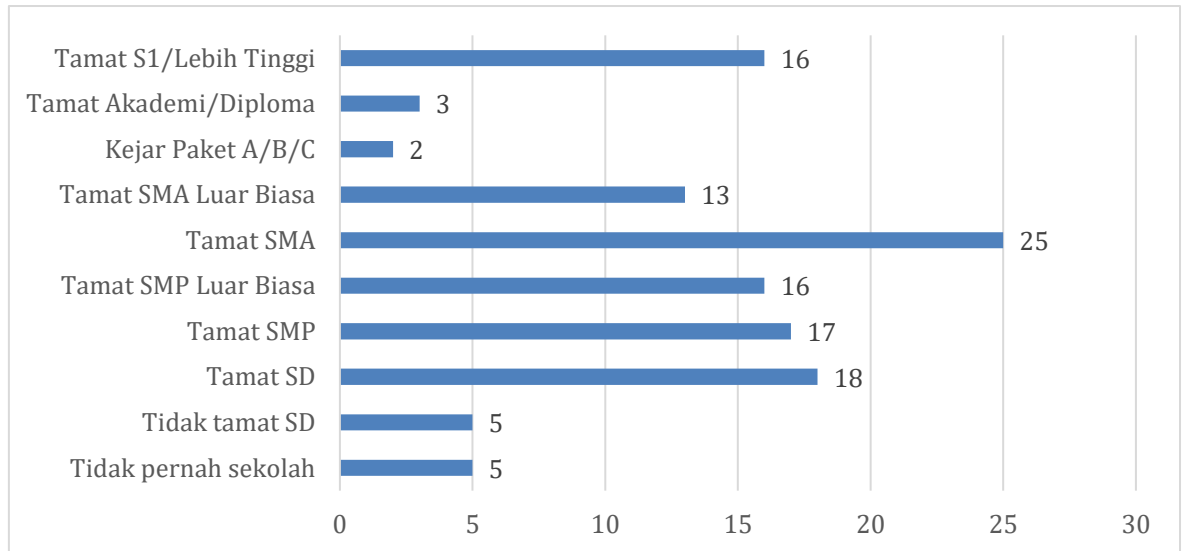


### 4. Tingkat Pendidikan

Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan tamat SMA sebanyak 25 responden. Terbanyak kedua adalah tamat SD sebanyak 18 responden dan terbanyak ketiga adalah tamat SMP sebanyak 17 responden. Tingkat pendidikan responden lainnya yakni tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD ada 5 responden, tamat SMP Luar Biasa ada 16 responden, tamat SMA Luar Biasa ada 13 responden, kejar paket A/B/C ada 2 responden, tamat akademi/diploma ada 3 responden, serta tamat sarjana atau lebih tinggi ada

16 responden.

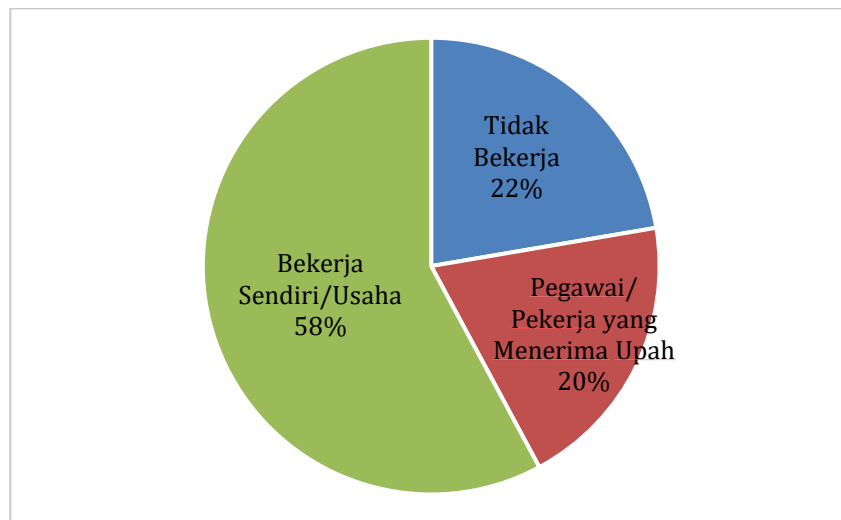
**Diagram VI.**  
**Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



## 5. Pekerjaan

Mayoritas responden bekerja sendiri/usaha sebanyak 70 responden (58%) per bulan Oktober 2020, dengan dominasi pekerjaan adalah penyedia jasa pijat mencapai 47 responden. Pekerjaan lainnya ada 24 responden (20%) sebagai pekerja penerima upah, dengan detail pekerjaan didominasi bidang informal seperti ojek online, buruh cuci, kuli bangunan, dan pelayan rumah makan, serta 27 responden (22%) tidak bekerja karena mengalami pemutusan hubungan kerja sebanyak 4 responden, keadaan disabilitasnya sebanyak 3 responden, dan usaha bangkrut sebanyak 1 responden. Selain itu ada 12 responden yang memiliki pekerjaan lebih dari 1 seperti kuli bangunan dan buruh cuci.

**Diagram VII.  
Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan**



#### **D. Hasil Survei/ Temuan Menarik**

Dari hasil survei ini, kami merangkum terdapat 8 temuan menarik dan penting yang perlu diperhatikan serta ditindaklanjuti, khususnya oleh pengambil kebijakan dan stakeholders terkait. Temuan tersebut yaitu:

**1. Secara ekonomi, penyandang disabilitas di DKI Jakarta sangat terdampak Covid-19.**

*Terdapat 89 responden (74%) menyebut mata pencahariannya terdampak*

Ada 89 responden (74%) yang mata pencahariannya dan pendapatannya memburuk. Dampak buruk tersebut misalnya berkurangnya pelanggan pijat atau bahkan tidak ada sama sekali pelanggan yang datang karena takut bersentuhan langsung, adanya pengurangan atau pemotongan gaji, adanya pengurangan jadwal kerja, bahkan ada responden yang mengalami kebangkrutan usaha akibat pandemi.

Dari 89 responden tersebut, 42% diantaranya merupakan tulang punggung keluarga yang berpenghasilan di bawah Rp1.000.000,-. Bahkan terdapat responden tulang punggung keluarga yang tidak mempunyai penghasilan, yaitu 3 responden. Responden tulang punggung keluarga tak berpenghasilan ini menyebut menerima bansos sembako sejak bulan April hingga Oktober 2020.

**2. Informasi bansos belum sepenuhnya merata menjangkau penyandang disabilitas, ramah disabilitas, lengkap, dan mudah dimengerti.**

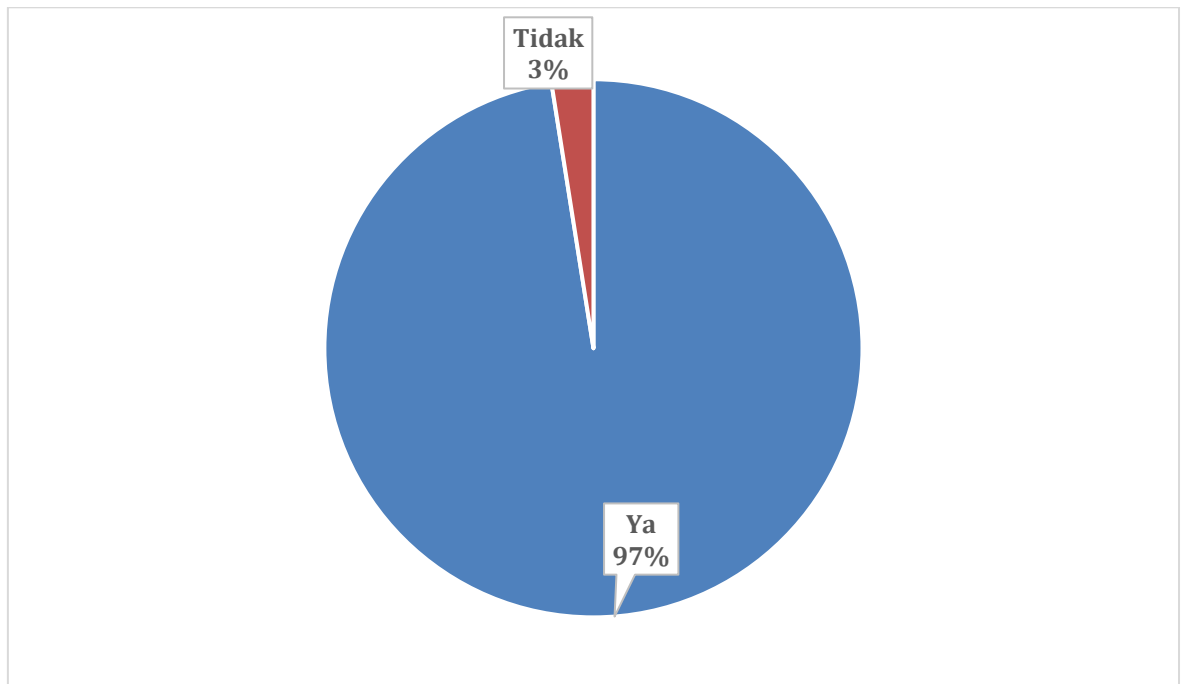
Terdapat responden yang mengaku telah mendapat informasi terkait bansos dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah menilai bahwa informasi tersebut belum ramah disabilitas (33%), lengkap (29%), dan mudah dimengerti (31%). Catatan ini disampaikan oleh penyandang disabilitas

sensorik. Hal ini salah satunya disebabkan informasi yang tersedia tidak disertai dalam bentuk yang aksesibel bagi ragam jenis disabilitas.

### 3. Responden merasa tidak layak mendapatkan bansos.

Terdapat 3 responden (3%) yang menilai dirinya tidak layak mendapatkan bansos. Beberapa alasannya yakni karena bekerja sebagai PNS, hanya menerima 2x bansos, dan ada yang lebih membutuhkan bansos. Responden yang menyatakan tidak layak menerima bansos karena hanya 2x dapat karena jika layak seharusnya ia mendapatkan bansos setiap bulan. Adapun responden lain yang merasa ada yang lebih membutuhkan bansos, akhirnya bansos yang ia terima diberikan kepada Komunitas Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Sindrom (POTADS).

**Diagram VIII.**  
**Responden Layak Mendapat Bansos**



### 4. Responden menyebut bahwa bansos yang diterimanya tidak sesuai dengan informasi ketentuan yang diketahui atau yang seharusnya.

Terdapat 30 responden (25%) yang menilai bentuk dan jumlah bansos yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diketahui. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian bansos seperti 20 responden menjawab ada pengurangan jumlah bansos, 10 responden menjawab kualitas bansos sembako tidak layak, 3 responden menjawab seharusnya mendapatkan uang tetapi diberi sembako, dan 5 responden memberikan alasan lainnya. Dalam pertanyaan ketidaksesuaian ini, responden boleh menjawab lebih dari 1 pilihan jawaban.

Adapun responden yang menjawab tidak tahu sebanyak 28 responden (23%). Jawaban tidak tahu dari responden ini mayoritas disebabkan keadaan disabilitas responden yakni netra yang tidak bisa menilai apakah bansos yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

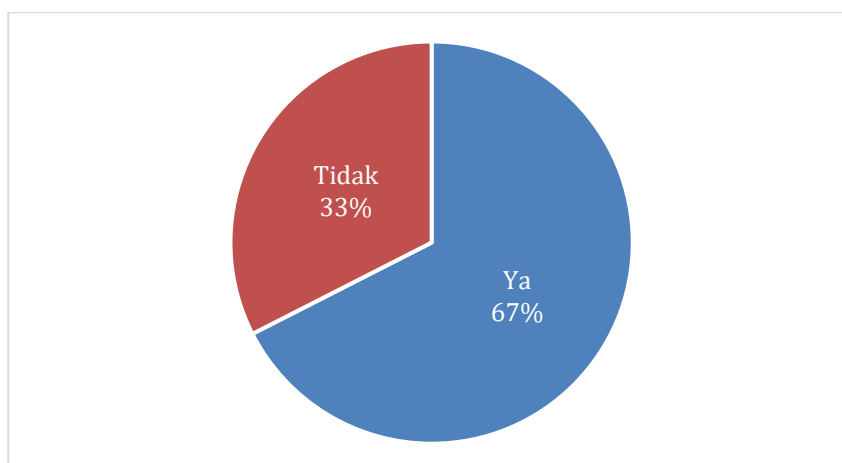
Dari 30 responden yang mengaku bahwa bansos yang diterimanya tidak sesuai, ada 4 responden (13%) yang melaporkan hal tersebut kepada beberapa pihak, yakni RT, LSM, radio, dan tetangga responden. Untuk respon dari RT terhadap laporan responden disebutkan bahwa RT hanya mencatat tanpa memberi informasi lebih lanjut.

Adapun 26 responden (87%) lainnya yang mengaku bahwa bansos yang diterima tidak sesuai hanya diam saja karena takut jika mengeluhkan keadaan bansos yang diterimanya tidak sesuai, akan membuat bansos yang diterima semakin dikurangi atau bahkan responden tidak mendapatkan bansos dari pemerintah lagi.

#### **5. Bansos tidak cukup memenuhi kebutuhan selama pandemi Covid-19.**

Terdapat 39 responden (33%) yang menilai bahwa bansos yang diberikan pemerintah tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi Covid-19. Beberapa alasan yang disebutkan responden yakni responden membutuhkan bansos uang tunai juga, tidak hanya sembako, karena ada kebutuhan untuk membayar kontrakan, listrik, uang sekolah anak; jumlah bansos yang diterima sedikit; hanya mendapatkan bahan pokok tanpa disertai lauk-pauk; dan bansos tidak cukup untuk hidup 1 bulan.

**Diagram IX.**  
**Bantuan Sosial Memenuhi Kebutuhan Selama Covid-19**





## **6. Kanal pengaduan yang dikembangkan dan dikelola oleh instansi pemerintah/lembaga negara belum banyak diketahui oleh responden.**

Saat ini telah banyak kanal pengaduan warga yang dimaksudkan untuk mengakomodir warga dalam menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau saran sehubungan dengan distribusi bansos. Diantaranya yaitu yang dikelola oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta, aplikasi JAGA yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Namun, kanal-kanal tersebut rupanya tak banyak diketahui responden.

Hanya 7% responden yang mengetahui call center Kemensos dan 8% responden yang mengetahui call center Dinsos DKI Jakarta. Sangat disayangkan aplikasi LAPOR! yang merupakan sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman RI dan telah ada sejak 5 tahun lalu hanya diketahui oleh 2% responden. Sedangkan aplikasi JAGA KPK yang di tengah pandemi juga dikembangkan untuk menerima pengaduan bansos hanya diketahui 1% responden.

Kurangnya pengetahuan responden atas kanal-kanal pengaduan ini juga muncul di hasil survei di Kota Bandung dan Kupang. Alhasil, tak banyak warga yang memanfaatkan kanal-kanal tersebut dan memilih diam saja ketika misalnya bansos yang diterima tidak sesuai ketentuan. Hal ini menjadi catatan penting bagi lembaga-lembaga pengelola agar kedepannya lebih meningkatkan sosialisasi kepada warga.

## **7. Masih ada *inclusion dan exclusion error*.**

Terkait pendataan untuk menerima bansos, ada 78 responden (65%) yang mengakui bahwa belum pernah didata sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Adapun saat pandemi Covid-19 sudah terjadi, ada 38 responden (32%) yang mengakui belum pernah didata untuk menerima bansos, yang mana diantaranya ada 19 responden yang bekerja sebagai penyedia jasa pijat dengan penghasilan di bawah Rp1.000.000,-. Jawaban responden ini menunjukkan bahwa pendataan masih menjadi masalah yang terus berulang. Dampak dari ketidakdisiplinan pendataan adalah ada penyandang disabilitas yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak terima (*inclusion error*), dan penyandang disabilitas yang seharusnya tidak menerima bansos malah menerima (*exclusion error*). Yang dimaksud *exclusion error* dalam penerima bansos bagi penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas yang tidak terdampak pandemi secara ekonomi tetapi masuk dalam data penerima bansos.

ICW juga menanyakan kepada responden, apakah mengetahui mengenai penyandang disabilitas lain yang seharusnya menerima/tidak menerima bansos tetapi malah tidak dapat/dapat bansos. Ada 55 responden (46%) yang

mengetahui ada penyandang disabilitas lain yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak menerima. Ada 16 responden (13%) yang mengetahui bahwa ada penyandang disabilitas lain yang seharusnya tidak terima tapi malah terima bansos. Penilaian ini diberikan responden dengan alasan ada penyandang disabilitas mampu secara ekonomi tetapi karena dekat dan masuk dalam OPD, sehingga mendapatkan jatah bansos. Alasan lain adalah ada penyandang disabilitas yang sudah di panti dan terdaftar mendapat bantuan, namun didaftarkan lagi sehingga mendapatkan bansos ganda.

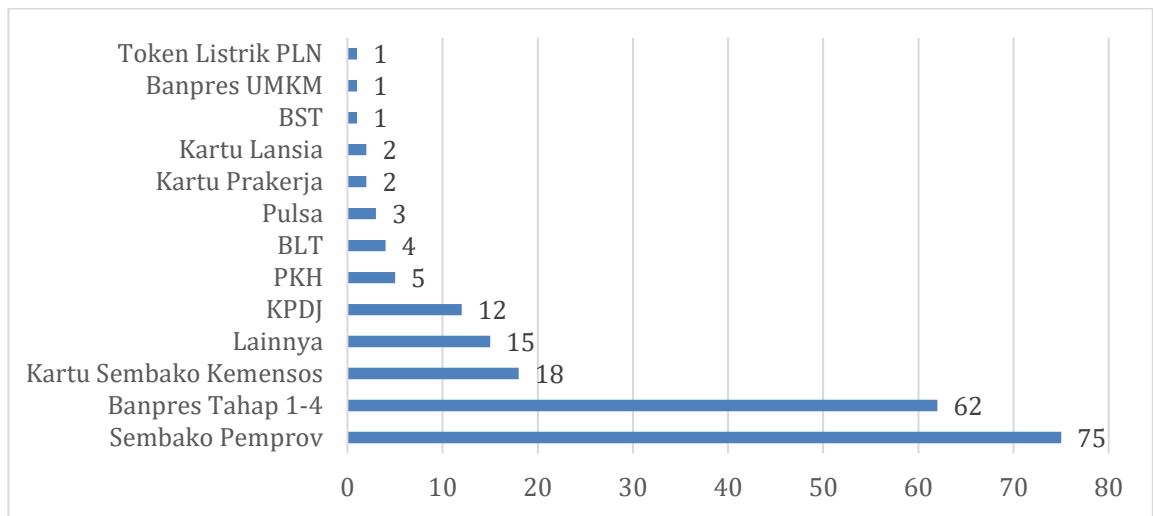
Pertanyaan lainnya yang ICW tanyakan kepada responden terkait memberi bansos kepada orang lain, ada 51 responden (42%) yang menjawab pernah memberikan bansos yang diterimanya kepada orang lain. Adapun mayoritas alasannya adalah diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan bansos, alasan terbanyak kedua adalah bansos yang diterima banyak sehingga dibagikan kepada orang lain. Jawaban dan responden survei ini menandakan selain masalah data, distribusi bansos tidak didahului dengan informasi kebutuhan penerima bansos.

Perlu dicatat bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data yang digunakan untuk mendistribusikan bansos. Jika data ini tidak diperbaharui secara berkala, maka akan banyak *inclusion dan exclusion error*.

#### **8. Jenis bansos yang paling banyak diterima adalah bantuan sembako dari Provinsi DKI Jakarta.**

Jenis bantuan sosial yang paling banyak diterima responden adalah bansos sembako dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada 75 responden yang menjawab menerima sembako dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jenis bansos terbanyak kedua yang diterima 62 responden adalah bantuan dari Presiden (banpres) tahap 1-4. Untuk pertanyaan penerimaan bansos, responden boleh menjawab lebih dari 1 jawaban. Dan ada 48 responden yang menjawab menerima lebih dari 1 jenis bansos.

**Diagram X.  
Jenis Bansos yang Diterima**



Terkait intensitas penerimaan bansos, ada jawaban beragam dari responden. Diketahui ada responden yang menerima bansos lebih dari 1 jenis setiap bulannya. Bulan April 2020 adalah bulan penerimaan bansos terbanyak. Hal ini karena bulan April adalah penetapan kondisi darurat oleh pemerintah sehingga pendistribusian bansos dioptimalkan. Pada bulan itu DKI Jakarta sangat kaya akan berbagai jenis bansos. Bahkan ada 1 responden yang menerima bansos sebanyak 4 kali. Juga ada 77 responden yang menerima bansos sebanyak 1 kali, 10 responden yang menerima bansos sebanyak 2 kali, dan 7 responden yang menerima bansos sebanyak 3 kali hanya di bulan April.

Menariknya, angka ini terus mengalami penurunan sejak bulan April hingga Oktober 2020. Penurunan ini seiring dengan keluhan responden bahwa penerimaan bansos tidak teratur setiap bulan seperti informasi yang disampaikan pemerintah.

**Tabel I.  
Intensitas Penerimaan Bansos**

Intensitas	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1x	77	74	76	57	43	38	26
2x	10	12	11	7	8	9	5
3x	7	5	5	6	4	3	5
4x	1						
Total	95	91	92	70	55	50	36

## E. Simpulan dan Rekomendasi

### 1. Simpulan

- a) Secara ekonomi, penyandang disabilitas di DKI Jakarta sangat terdampak Covid-19. Ada 89 responden (74%) yang mata pencahariannya terdampak, dengan 42% responden diantaranya merupakan tulang punggung keluarga dengan penghasilan di bawah Rp1.000.000,-.
- b) Informasi bansos belum sepenuhnya merata menjangkau penyandang disabilitas, ramah disabilitas, lengkap, dan mudah dimengerti.
- c) Terdapat 3 responden yang merasa tidak layak mendapatkan bansos karena latar belakang pekerjaan, ada yang lebih membutuhkan, dan rasa ketidakpercayaan terhadap diri sendiri karena hanya menerima dua kali bansos selama 8 bulan terakhir.
- d) Terdapat 30 responden yang menilai bahwa bansos yang diterimanya tidak sesuai dengan informasi ketentuan yang diketahui atau yang seharusnya. Bentuk ketidaksesuaian bansos seperti adanya pengurangan jumlah atau nilai paket bansos (18 responden), kualitas bansos sembako yang tidak layak (10 responden), dan yang seharusnya menerima uang tetapi diberikan sembako (3 responden).
- e) Terdapat 33% responden yang menyatakan bahwa bansos yang diterima belum cukup memenuhi kebutuhan selama pandemi Covid-19.
- f) Kanal pengaduan yang dikembangkan dan dikelola oleh instansi pemerintah/lembaga negara belum banyak diketahui oleh responden. Alhasil kanal tersebut tidak dimanfaatkan oleh responden untuk menginformasikan ketidaksesuaian bansos yang diterima.
- g) Masih ada *inclusion dan exclusion error* dalam data penerima bansos DKI Jakarta. Terdapat 38 responden (32%) yang mengaku tidak didata saat pandemi sudah terjadi. Padahal 19 responden diantaranya bekerja sebagai penyedia jasa pijat dengan penghasilan di bawah Rp1.000.000,-. Dampak yang terjadi akibat ketidakakuratan data adalah ada penyandang disabilitas yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak terima, ada penyandang disabilitas yang seharusnya tidak terima tapi menerima bansos, dan pemberian bansos kepada orang lain karena tidak diiringi dengan identifikasi kebutuhan penerima bansos.
- h) Jenis bansos yang paling banyak diterima adalah bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bantuan Presiden (Banpres) tahap 1-4. Untuk penerimaan bansos berjenis Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) hanya 12 responden yang menjawab menerimanya.
- i) Terdapat responden yang menerima bansos lebih dari satu kali setiap bulannya, bahkan ada yang menerima empat kali bansos dalam satu bulan. Tetapi menariknya, angka penerimaan bansos setiap bulannya semakin menurun bahkan untuk jumlah responden yang menerima bansos hanya satu kali setiap bulan.

## **2. Rekomendasi**

- a) Pemberian bansos disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas, mengingat pemerintah pusat dan daerah mempunyai banyak jenis bansos dengan nominal/bentuk yang berbeda-beda.
- b) Informasi terkait bansos perlu lebih diperjelas dan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan ragam disabilitas.
- c) Adanya kanal informasi satu pintu yang mudah diakses dan ramah disabilitas.
- d) Kanal pengaduan lebih masif disosialisasikan dan ramah disabilitas.
- e) Ada satu basis data penyandang disabilitas terpadu yang secara rutin diperbaharui dan menjadi rujukan/digunakan oleh lintas sektor pemerintah.
- f) Memaksimalkan implementasi program KPDJ dari hulu terkait pendataan hingga hilir terkait pencairan dana KPDJ.
- g) Semua penyandang disabilitas menerima KPDJ, tidak hanya penyandang disabilitas yang tergolong tidak mampu.

**Indonesia Corruption Watch**  
Dewi Anggraeni – Almas Sjafrina